

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA BONTANG:
STUDI KOMPARASI PEMERINTAHAN ERA NENI
MOERNIAENI-BASRI RASE PERIODE 2016-2021 DENGAN
BASRI RASE-NAJIRAH PERIODE 2021-2025**

Ummi Latifah Ma'sumah Jalil

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 04, 2026**

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA BONTANG: STUDI KOMPARASI PEMERINTAHAN ERA NENI MOERNIAENI-BASRI RASE PERIODE 2016-2021 DENGAN BASRI RASE-NAJIRAH PERIODE 2021-2025

Umami Latifah Ma'sumah Jalil¹, Jumansyah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan tata kelola pemerintahan di Kota Bontang pada masa kepemimpinan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG periode 2016–2021 dan H. Basri Rase, S.I.P periode 2021–2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan orientasi pembangunan pada kedua periode kepemimpinan yang menunjukkan karakter kebijakan berbeda dalam mengelola pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui analisis data sekunder berupa dokumen pemerintah daerah, data pendidikan, data infrastruktur, dan data perkembangan UMKM, serta data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan pada era Neni Moerniaeni lebih menekankan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, era Basri Rase lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua periode pemerintahan memiliki capaian dan tantangan masing-masing dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah, kepemimpinan daerah, pembangunan daerah, kota bontang*

Pendahuluan

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang tersedia melalui tata kelola pemerintahan yang efektif.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iglalalfh@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Menurut konsep *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan responsivitas. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Bontang merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik sebagai kota industri. Keberadaan sektor industri besar memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah, namun pemerintah tetap memiliki tantangan dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dalam periode 2016–2025, Kota Bontang mengalami dua kepemimpinan daerah dengan arah pembangunan yang berbeda. Pada masa kepemimpinan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG periode 2016–2021, pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan pada sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyediakan fasilitas pendukung bagi aktivitas masyarakat.

Sementara itu, pada periode kepemimpinan H. Basri Rase, S.I.P tahun 2021–2025, pemerintah daerah melakukan pergeseran fokus pembangunan dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM. Pemerintah mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha, pelatihan, serta penguatan sektor ekonomi lokal.

Perbedaan strategi pembangunan tersebut menunjukkan bahwa setiap periode pemerintahan memiliki pendekatan tata kelola yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan pada kedua periode tersebut serta melihat keunggulan dan tantangan masing-masing kebijakan pembangunan.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah merupakan sistem administrasi yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola kewenangan pemerintahan di wilayah otonom. Sugiarta & Widiati (2020) mengemukakan bahwa daerah tidak hanya merupakan entitas geografis, tetapi juga memiliki fungsi administratif sebagai sarana operasional pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya. Rahayu (2022) menegaskan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), terdapat beberapa pilar utama dalam mewujudkan *Good Governance* yang ideal di tingkat daerah, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. Kelima prinsip

ini saling berkaitan dalam membangun birokrasi yang tepercaya. Pihak pemerintah daerah diwajibkan untuk menjunjung tinggi transparansi, yaitu penyediaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai seluruh proses pembuatan kebijakan publik. Keterbukaan tersebut juga harus diimbangi dengan akuntabilitas, yang menegaskan adanya kewajiban moral maupun administratif berupa pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparatur daerah. Selain itu, perumusan dan pelaksanaan program daerah tidak boleh berjalan satu arah, melainkan wajib melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil (*civil society*) agar pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Terakhir, pilar-pilar tersebut disempurnakan oleh aspek responsivitas, yang mengukur tingkat kecepatan serta ketepatan birokrasi pemerintahan dalam melayani dan menanggapi segala kebutuhan dasar warga secara efisien. .

Kepemimpinan Daerah

Kepemimpinan daerah memainkan peran krusial dalam menentukan arah, prioritas, dan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Teori kepemimpinan visioner menurut Nanus (1992) menekankan kemampuan pemimpin menciptakan visi masa depan yang jelas, sementara kepemimpinan transformasional menurut Burns (1978) menitikberatkan inovasi kebijakan dan motivasi kolektif. Perbedaan gaya komunikasi dan orientasi eksekutif secara langsung memengaruhi pengalokasian anggaran daerah, baik dalam porsi infrastruktur fisik (*infrastructural-driven development*) maupun pemberdayaan ekonomi lokal (*people-centered economic development*).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dirancang dalam studi ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan *mixed methods* (metode kombinasi), yaitu menggabungkan secara terpadu metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu alur riset yang sama. Merujuk pada pandangan Creswell dan Plano Clark (2018), pemanfaatan metode campuran ini sangat tepat diterapkan untuk membedah kompleksitas masalah sosial serta fenomena tata kelola pemerintahan perkotaan yang dinamis. Dalam penerapannya, data kuantitatif yang bersumber dari indikator angka statistik makro, data sektoral Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, serta nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mengidentifikasi pola tren capaian empiris antarpemimpin secara objektif. Di sisi lain, data kualitatif berfungsi untuk memperdalam analisis dengan menguraikan aspek makna, dinamika sosial, serta latar belakang kontekstual di balik perbedaan arah kebijakan pembangunan tersebut.

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, pengumpulan data dilakukan melalui dua klasifikasi sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci yang merepresentasikan struktur pemerintahan dan instansi terkait, seperti perwakilan Kesbangpol, DPMPTSP, tenaga kependidikan (Kepala Sekolah SDN 002 Bontang Barat), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM perkotaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen resmi kedinasan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta draf

RPJMD Kota Bontang periode 2016–2021 dan 2021–2025. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk data numerik, serta model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) untuk data verbal, dengan tetap mengutamakan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Sektor Pendidikan Antar Periode

Pada masa kepemimpinan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG (2016–2021), sektor pendidikan menempati prioritas tertinggi dalam skema investasi sumber daya manusia jangka panjang. Kebijakan makro diarahkan pada perluasan aksesibilitas sekolah dan pemerataan kualitas penunjang akademik.

Tabel 1 Statistik Pendidikan Kota Bontang Era Neni Moerniaeni

Uraian	2016	2021
Harapan lama sekolah (Tahun)	12,79	13,17
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,39	10,80
Jumlah Satuan Sekolah (Unit)	123 unit	121 unit
Total Siswa Terdaftar (Murid)	38.026 Murid	39.482 Murid
Total Tenaga Pendidik (Guru)	2.348 Guru	2.403 Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang (2017 – 2022)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat peningkatan konsisten pada Harapan Lama Sekolah (dari 12,79 menjadi 13,17 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (dari 10,39 menjadi 10,80 tahun). Kebijakan spesifik yang sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat pada era ini meliputi pemberian paket bantuan seragam, sepatu, tas, dan buku tulis gratis bagi siswa prasejahtera, serta pemberian tunjangan insentif yang adil bagi guru honorer (sekolah negeri maupun swasta).

Memasuki periode H. Basri Rase, S.I.P. (2021–2025), statistik kualitatif menunjukkan kelanjutan peningkatan indikator kualitas dasar, meskipun secara kuantitas terjadi penurunan jumlah murid dan restrukturisasi kelembagaan.

Tabel 2 Statistik Pendidikan Kota Bontang Era Basri Rase

Uraian	2021	2024
--------	------	------

Harapan lama sekolah (Tahun)	13,17	13,73
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,80	10,97
Jumlah Satuan Sekolah (Unit)	121 Unit	113 Unit
Total Siswa Terdaftar (Murid)	39.482 Murid	35.789 Murid
Total Tenaga Pendidik (Guru)	2.403 Guru	2.224 Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang (2022 – 2025)

Pada era Basri Rase, fokus pendidikan bergeser pada peningkatan kapasitas teknis penunjang melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) di 6 sekolah (seperti SDN 010 Bontang Utara) guna menekan intensitas kegiatan belajar bergilir (*double shift*). Namun secara keseluruhan, berdasarkan wawancara mendalam, masyarakat menilai intervensi bantuan perlengkapan operasional personal siswa pada era Neni Moerniaeni jauh lebih masif dan berdampak langsung pada penghematan pengeluaran domestik keluarga.

Analisis Capaian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki korelasi erat dengan perluasan investasi ekonomi. Di bawah kendali Wali Kota Neni Moerniaeni, indikator "panjang jalan kondisi baik" dikelola secara terukur.

Tabel 3 Capaian Panjang Jalan Kondisi Baik Era Neni Moerniaeni (2016–2021)

Indikator Infrastruktur	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan total (km)	206,40	206,39	206,40	206,40	206,40	204,41
Jalan Kondisi Baik (km)	195,23	182,42	177,83	189,23	185,89	97,61
Jalan Kondisi Sedang	0,85	2,98	7,37	9,31	11,31	62,10
Jalan Kondisi Rusak (km)	2,19	4,63	15,77	3,68	4,06	44,70

Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	94,6	88,4	86,2	91,7	90,1	47,78
--	------	------	------	------	------	-------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2016 – 2021)

Pemerintahan Neni Moerniaeni mencatatkan konsistensi capaian pemeliharaan jalan berkisar antara 89% hingga 99.95%. Selain jalan, beberapa proyek infrastruktur strategis monumental berhasil direalisasikan pada era ini, di antaranya perluasan masif program pipa sambungan rumah tangga *Bontang City Gas*, inisiasi perencanaan fisik *Jalan Lingkar*, serta pembangunan drainase urban perkotaan dan turap guna mereduksi ancaman luapan banjir tahunan di area pemukiman seperti perumahan Bontang Permai.

Pada periode kepemimpinan Basri Rase (2021–2025), terjadi pemulihan persentase jalan kondisi mantap setelah sempat mengalami penurunan drastis di akhir tahun 2021 akibat beban muatan armada kendaraan berat logistik industri di kawasan Kelurahan Bontang Lestari.

Tabel 4 Capaian Panjang Jalan Kondisi Baik Era Hasri Rase (2016–2021)

Indikator Infrastruktur	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan total (km)	204,41	176,56	176,56	206,40
Jalan Kondisi Baik (km)	97,61	134,22	134,22	189,23
Jalan Kondisi Sedang	62,10	35,46	35,46	9,31
Jalan Kondisi Rusak (km)	44,70	6,88	6,88	3,68
Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	47,78	76,02	76,02	91,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari Tabel 4, terlihat akselerasi rekonstruksi jalan melompat naik dari 47,78% di tahun 2021 hingga menyentuh angka 91,70% pada tahun 2024. Di samping pemulihan jalan, pilar infrastruktur era Basri Rase ditandai dengan peresmian 12 gedung fasilitas pelayanan publik baru guna menunjang produktivitas lembaga kemasyarakatan, antara lain Kantor Baru BAZNAS Kota Bontang, Depot Arsip Perkotaan, Kantor Kelurahan Api-Api, Gedung Administrasi KIR Dinas Perhubungan, dan gedung operasional teknis lainnya.

Peningkatan Sektor Pariwisata dan Pemberdayaan UMKM

Dari Tabel 4.4, terlihat akselerasi rekonstruksi jalan melompat naik dari 47,78% di tahun 2021 hingga menyentuh angka 91,70% pada tahun 2024. Di samping pemulihan jalan, pilar infrastruktur era Basri Rase ditandai dengan peresmian 12 gedung fasilitas pelayanan publik baru guna menunjang produktivitas lembaga kemasyarakatan, antara lain Kantor Baru BAZNAS Kota Bontang, Depot Arsip Perkotaan, Kantor Kelurahan Api-Api, Gedung Administrasi KIR Dinas Perhubungan, dan gedung operasional teknis lainnya.

Tabel 5 Tren Wisatawan dan Unit Usaha Era Neni Moerniaeni

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	Estimasi Jumlah Unit UMKM
2016	103.712	6.000 – 7.000
2017	363.868	7.500
2018	421.920	8.200
2019	409.319	8.500
2020	101.679	8.710

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022 – 2025)

Pada era Neni Moerniaeni, pertumbuhan UMKM berjalan selaras (*linier*) dengan ekspansi destinasi wisata baru. Lonjakan kunjungan wisatawan lokal yang menembus angka 421.920 orang pada tahun 2018 berimplikasi langsung pada produktivitas usaha kuliner, penginapan, dan kerajinan tangan lokal, khususnya di area wisata bahari perkampungan atas air Bontang Kuala. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, UMKM bertindak sebagai katup pengaman sosial ekonomi melalui diversifikasi produk rumah tangga.

Perubahan pendekatan tata kelola yang radikal diterapkan pada era Basri Rase-Najirah. Sektor ekonomi kerakyatan ditempatkan sebagai episentrum kebijakan daerah.

Tabel 6 Pertumbuhan Ekonomi UMKM Era Basri Rase

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Unit UMKM	Keterangan Fenomena
2021	110.000	16.929	Masa transisi UMKM melonjak karena pendaftaran BPUM.
2022	200.000+	19.065	Pembukaan kembali objek wisata secara penuh.
2023	300.000	19.467	Peningkatan fokus pada wisata maritim & ekonomi kreatif.

2024	>300.000 (proyeksi)	20.406	Target wisata digital dan <i>nomadic tourism</i> .
-------------	---------------------	--------	--

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022 – 2025)

Tabel 4.6 merekam lonjakan volume pelaku UMKM dari 16.929 unit di tahun 2021 melesat tajam menjadi 20.406 unit usaha mikro pada tahun 2024. Kenaikan volume sebesar 20,5% ini didorong oleh kemudahan akses legalitas hukum penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis lewat integrasi sistem digital pelayanan *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, intervensi penguatan berupa program pelatihan kewirausahaan secara terpadu, penyaluran bantuan modal usaha mikro, fasilitasi sertifikat jaminan produk halal, serta pelaksanaan kegiatan studi banding berkala bagi pelaku industri kreatif ke wilayah Jawa dan Bali menjadikan tata kelola UMKM era Basri Rase jauh lebih unggul,

Aspek	Era Neni Moerniaeni dan Basri Rase (2016 – 2021)	Era Basri Rase dan Najirah (2021 – 2025)
Fokus	SDM dan Pelayanan	Infrastruktur dan Ekonomi
Pendidikan	Prioritas Utama	Tidak Dominan
Kesehatan	Pelayanan Dasar	Pendukung
Infrastruktur	Terbatas	Prioritas Utama
Ekonomi	Pemberdayaan	Penguatan UMKM
Pelayanan	Semi digital	Digitalisasi

tertata formal, dan berkelanjutan secara sistemik.

Perbandingan Tata Kelola Pemerintahan Kedua Era

Pergeseran arah prioritas program unggulan antarpemimpin di Kota Bontang memicu perubahan orientasi cara publik dalam mengapresiasi kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

Tabel 7 Perbandingan Kinerja Program Unggulan

Implikasi nyata dari pergeseran fokus program (Tabel 4.7) tercermin pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bontang. Pada akhir kepemimpinan Neni Moerniaeni (2021), akumulasi kepuasan publik tercatat pada skor **78,9** (Kategori Baik). Publik mengapresiasi tinggi jaminan bantuan operasional sekolah gratis dan kemudahan mobilitas fisik jalan lingkungan. Namun, terdapat kritik mengenai kurangnya diversifikasi lapangan usaha di luar ketergantungan industri gas bumi.

Di sisi lain, era Basri Rase mencatatkan lompatan kepuasan publik urban perkotaan dengan perolehan skor IKM sebesar **82,3** (Kategori Sangat Baik). Temuan analisis riset mengonfirmasi bahwa masyarakat urban kontemporer memberikan nilai ukur kepuasan yang lebih tinggi pada responsivitas interaksi pelayanan publik, kemudahan birokrasi pengurusan administrasi usaha, serta kedekatan komunikasi emosional eksekutif dengan struktur komunitas akar rumput pelaku usaha kecil menengah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan urusan sektor pendidikan pada era dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG (2016–2021) jauh lebih dominan, komprehensif, dan spesifik melalui intervensi bantuan paket perlengkapan sekolah gratis dari jenjang dasar hingga menengah yang menyentuh langsung keluarga prasejahtera. Sebaliknya, era Basri Rase (2021–2025) lebih menitikberatkan fokusnya pada perluasan infrastruktur fisik ruang kelas baru.

Di sektor infrastruktur, era Neni Moerniaeni unggul dalam inisiasi ekspansi awal pembangunan berskala besar yang monumental, seperti perluasan program Jargas rumah tangga, penanganan banjir turap permukiman, dan perencanaan jalan lingkar alternatif. Sementara itu, era Basri Rase berhasil mengoptimalkan capaian rekonstruksi serta pemeliharaan jalan mantap perkotaan hingga kembali menyentuh persentase 91,70% pada tahun 2024, di samping melengkapi penyediaan gedung fasilitas pelayanan administrasi masyarakat.

Adapun pada sektor pariwisata dan UMKM, era Basri Rase mencatatkan keberhasilan yang jauh lebih sukses, tertata formal, dan maju secara kualitas kelembagaan. Lonjakan volume unit usaha mikro hingga mencapai 20.406 unit merupakan implikasi nyata dari kemudahan penerbitan NIB lewat integrasi perizinan OSS, pemberian bantuan modal, pelatihan manajerial terpadu, serta program digitalisasi ekonomi kreatif yang masif.

Saran

Untuk keberlanjutan pembangunan Kota Bontang di masa mendatang, rezim eksekutif selanjutnya disarankan merumuskan regulasi baku yang mampu mengawinkan kembali program pemberian bantuan paket peralatan personal operasional murid gratis secara berkala dengan peningkatan sarana fisik bangunan sekolah.

Pada sektor infrastruktur, pihak pengambil keputusan daerah perlu menerapkan kebijakan pengawasan muatan kendaraan berat (tonase) secara ketat dan kontinu, khususnya di jalur vital logistik industri seperti wilayah Kelurahan Bontang Lestari, demi menjaga keberlanjutan usia pakai aset jalan mantap kota yang telah diperbaiki.

Terakhir, di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Bontang harus senantiasa konsisten mendorong agenda integrasi program promosi destinasi wisata bahari berbasis komunitas lokal seperti sentra kuliner perkampungan air Bontang Kuala dengan sistem pemasaran produk UMKM berbasis media digital perkotaan secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.

Amir, L. (2014). *Good Governance: Konsep, Prinsip, dan Implementasi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

- Asaduzzaman, M. (2020). *Governance and Public Policy in Developing Countries*. University Press Limited.
- Astuti, R. (2020). *Paradigma Baru Tata Kelola Pemerintahan: Dari Government ke Governance*. Deepublish.
- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (1966). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Bontang, B. K. (2025). *Wali Kota Basri Rase Meresmikan Kantor Baru Baznas Kota Bontang*. Kotabontang.Baznas.Go.Id; BAZNAS Kota Bontang. <https://kotabontang.baznas.go.id/berita/news-show/walikota-basri-rase-meresmikan-kantor-baru-baznas-kota-bontang/14673>
- Bontang, P. K. (2016). *RPJMD Kota Bontang 2016–2021*. Bappeda Kota Bontang.
- Bontang, P. K. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021*. Pemerintah Kota Bontang.
- Bontang, S. D. K. (2025a). *Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Resmikan 12 Gedung Baru untuk Pelayanan Masyarakat*. Setda.Bontangkota.Go.Id; Pemerintah Kota Bontang. <https://setda.bontangkota.go.id/wali-kota-dan-wakil-wali-kota-bontang-resmikan-12-gedung-baru-untuk-pelayanan-masyarakat>
- Bontang, S. D. K. (2025b). *Wali Kota Resmikan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di 6 Sekolah*. Setda.Bontangkota.Go.Id; Pemerintah Kota Bontang. <https://setda.bontangkota.go.id/wali-kota-resmikan-pembangunan-fasilitas-pendidikan-di-6-sekolah>
- Budiarto, T., Suharto, E., & Pramusinto, A. (2005). *Privatisasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. Gustav Fischer.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (2011). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. Cornell University Press.
- Council, P. E. C. (2000). *Toward Good Governance for Development*. Pacific Economic Cooperation Council Secretariat.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dwijaksana, K. A. (2015). Studi Komparasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Laki- Laki. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1).

- Dwiningrum, S. I. A. (2019). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press.
- Fitriwahyuningsih. (2025). *Tinjau Banjir di Bontang Permai, Wali Kota Neni Janjikan Solusi Lewat Pembangunan Turap*. Kaltimtoday.Co. <https://kaltimtoday.co/tinjau-banjir-di-bontang-permai-wali-kota-neni-janjikan-solusi-lewat-pembangunan-turap>
- Handayani, L. M., Putra, A. D., & Santoso, H. (2023). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelayanan Publik yang Responsif. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–117.
- Haya, M. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Deepublish.
- Ibori, T. (2020). Community Participation and Sustainable Rural Development. *Journal of Social Development Studies*, 15(2), 55–70.
- Indonesia, L. A. N. R. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN-RI. Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009). Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Jaya, I. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Deepublish.
- Kajian, T., & Indonesia, R. (2015). *Good Governance dalam Administrasi Publik di Indonesia*. Pusat Kajian Kebijakan dan Administrasi Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Kaltim, A. (2024). *Data Jumlah UMKM di Kota Bontang Tahun 2021–2024*. Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (2000). *Governance Matters: From Measurement to Action*. The World Bank.
- Khairudin, M. (2019). *Motivasi dan Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Deepublish.
- Kharisma, B. (2014). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Unpad Press.
- Kuncoro, M. (2010a). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2010b). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.

- Labolo, M. (2006). *Ilmu Pemerintahan: Dinamika dan Fenomena Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Mandeli, K. N. (2016). Good Urban Governance: Framework and Challenges in the Context of Sustainable Development. *Journal of Urban Management*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2016.12.001>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014a). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014b). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubyarto. (1988). *Pembangunan: Masalah dan Strategi*. BPFE.
- Mulyadi. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah*. Alfabeta.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-developed Regions*. Duckworth. Nanus, B. (1992). *Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*. Jossey-Bass Publishers.
- Nasution, M. (2020). *Kepemimpinan Visioner dalam Pemerintahan Daerah: Strategi dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan*. CV Pustaka Prima.
- Nations, U. (2014). *United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Nawawi, H. (2003). *Kepemimpinan yang Efektif*. Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, T. (1997). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2020). *Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.
- Putrijanti, A., Santoso, B., & Lestari, D. (2018). *Administrasi Pemerintahan: Perspektif UU No. 30 Tahun 2014*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rachmawati, I. N. (2011). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 14(2), 56–64. <https://doi.org/10.7454/jki.v14i2.5>

- Rahayu, S. (2022). *Pemerintahan Daerah dan Otonomi di Indonesia*. Deepublish (CV Budi Utama).
- Realita, M. L. (2020). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai*. STIE IPWI Jakarta.
- Redaksi. (2025). *Neni Moerniaeni Mulai Pimpin Bontang, Prioritaskan 10 Program Utama*. Mediakaltim.Com. <https://mediakaltim.com/neni-moerniaeni-mulai-pimpin-bontang-prioritaskan-10-program-utama>
- Richardson, H. W. (1978). *Regional and Urban Economics*. Penguin Books.
- Rinjani, D. (2023). *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menurut KNKG dan Implementasinya di Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Rohman, A., & Hanafi, I. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 123–137.
- Rusli. (2019). *Neni Yakin Jalan Lingkar Akan Dibangun*. Prokal.Co. <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773971181/neni-yakin-jalan-lingkar-akan-dibangun>
- Savas, E. S. (1982). *Privatization: The Key to Better Government*. Chatham House.
- Savas, E. S. (1987). *Privatization: The Key to Better Government Services*. Chatham House.
- Sjafrizal. (2012). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sjamsuddin, N. (2017). Governance dan Sinergi Tiga Pilar Pembangunan: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 13(2), 45–58.
- Slamet, M. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Partisipasi dan Kemandirian*. Gava Media.
- Soemodiningrat, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soetrisno, L. (2018). *Menuju Pembangunan Partisipatif*. Kanisius.
- Suci Surya. (2024). *Inisiator Masifnya Pemasangan Jargas di Bontang, Neni Moerniaeni Getol Negosiasi ke Pemrov hingga Pusat*. Kaltim.Akurasi.Id. <https://kaltim.akurasi.id/humaniora/inisiator-masifnya-pemasangan-jargas-di-bontang-neni-moerniaeni-getol-negosiasi-ke-pemrov-hingga-pusat>
- Sugiarta, I. N., & Widiati, N. L. G. (2020). *Administrasi Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. Universitas Udayana Press.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sunarto, & Welly, A. (2018). *Governance dan Etika Birokrasi di Era Modernisasi Administrasi*. Alfabeta.
- Syafi'ie, I. K. (2004). *Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Syafrizal. (2016). *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Dinamika Otonomi di Indonesia*. Alfabeta.
- Syarifin, A., & Jubaedah, R. (2005). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. CV Humaniora.
- Tandung, M. S. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Bupati terhadap Tingkat Kepatuhan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Negeri Makassar.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.